

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Rangkaian tahapan analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bingkai *KR* terkait pemberitaan yang dilakukan wacana perempuan raja kraton serta bagaimana sikap *KR* dalam pemberitaan yang dilakukan. Penelitian menggunakan metode framing untuk melihat bagaimana media massa mengkonstruksi realitas.

Dalam analisis teks, peneliti menggunakan 4 perangkat *framing* dari Pan dan Kosicki yaitu: sintaksis, skriptural, tematik dan retorik. Dengan keempat perangkat tersebut dapat menunjukkan *framing KR* terkait realitas apa yang diseleksi dan ditonjolkan dalam pemberitaan mengenai wacana perempuan raja kraton.

Pada level konteks, peneliti menggali data dari pihak *KR* dengan melakukan wawancara pada Redaktur Pelaksana dan jawa wartawan *KR*. Pada level konteks ini peneliti mengacu pada konsep yang dikemukakan Resse dan Shoemaker yang memiliki 5 faktor yang mempengaruhi isi dari media massa yakni tingkat individual, rutinitas media, organisasi media, ekstramedia dan ideologi media. Dengan konsep yang dikemukakan Resse dan Shoemaker peneliti menggali informasi bagaimana proses produksi berita dan kebijakan redaksi *KR* terkait dengan wacana perempuan raja kraton.

Berdasarkan frame besar *KR* cenderung menonjolkan bahwa raja kraton adalah keturunan laki-laki. mayoritas narasumber yang ditampilkan oleh *KR* menunjukkan sikap kurang setuju terhadap wacana perempuan raja kraton dengan memberikan alasan yang berlandaskan pada *paugeran* sebagai konstitusi kraton. *KR* juga menonjolkan bahwa ketidaksetujuan yang dilontarkan oleh mayoritas narasumber karena perubahan *paugeran* itu sendiri bukanlah persoalan yang mudah dan butuh proses serta tinjauan lebih lanjut.

Mengenai pemilihan narasumber yang dimunculkan pada berita (baik *headline* dan halaman pertama) mengenai wacana perempuan raja kraton *KR* memiliki kriteria tertentu. Tidak semua narasumber dan pernyataannya dapat ditampilkan dalam berita. Berita dalam halaman pertama terlebih *headline* akan menjadi referensi bagi pembaca sehingga kelayakan pernyataan narasumber diperhitungkan. Narasumber yang dipilihpun adalah narasumber ahli memiliki kredibilitas dan kompetensi terkait dengan wacana perempuan raja kraton.

Meskipun dalam analisis konteks *KR* mengaku bersikap netral dengan pemberitaan yang dilakukan namun peneliti melihat bahwa pemberitaan yang dilakukan melalui serangkaian proses seleksi berita mulai dari pemilihan narasumber yang lebih banyak mendukung bahwa raja adalah laki-laki dan mempertahankan *paugeran* adalah bentuk keberpihakan *KR* itu sendiri. Pada akhirnya jelas *KR* tidak netral seperti yang diungkapkan oleh Aksan Susanto dan Hudono. Sehingga *KR* kurang “seimbang” dalam mengakomodasi kepentingan publik. Terlepas dari itu semua, *KR* berupaya sebagai koran independen untuk mengutamakan kepentingan publik. Orientasi *KR* adalah mengutamakan

kedewasaan berfikir masyarakat dengan memberikan referensi yang terkait dengan wacana perempuan raja kraton.

Peneliti juga melihat bahwa pemberitaan yang dilakukan KR masih dipengaruhi oleh kedekatannya dengan Kraton Yogyakarta. KR menggunakan bahasa yang halus dan terkesan menghormati Sultan Hamengku Buwono X yang merupakan Raja Kraton Yogyakarta. Selain itu sikap yang ditunjukkan oleh KR yang banyak menampilkan pendapat dari narasumber yang kurang setuju dengan wacana Raja Perempuan Kraton Yogyakarta juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh bahwa KR hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki yang menonjolkan dominasi laki-laki.

B. SARAN

Dalam penelitian ini, masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan baik dalam proses maupun hasil dari penelitian. Kendala yang dihadapi peneliti ketika melakukan analisis teks yakni untuk membedah makna yang terkandung dari masing-masing kata atau kalimat yang diteliti, penggunaan judul, penempatan pernyataan narasumber, penggunaan grafis, dan juga makna yang terkandung dalam teks berita yang diteliti. Sehingga tidak dipungkiri ada ketidaktepatan peneliti dalam menggali *frame* pada setiap berita yang diteliti.

Peneliti hanya melihat *frame* dari satu media saja yaitu KR. Banyak hal yang bisa digali lebih dalam mengenai wacana perempuan raja kraton ini misalnya membandingkan dengan koran lokal Yogya lainnya untuk melihat

bagaimana perbandingan *frame* dari masing-masing media khususnya mengenai wacana perempuan raja kraton.

Penelitian ini menggunakan perangkat model *framing* Pan dan Kosicki yang lebih memfokuskan meneliti media melalui struktur bahasa yang digunakan dalam membingkai suatu realitas sehingga tidak menutup kemungkinan jika wacana perempuan raja kraton ini dianalisis dengan perangkat *framing* model yang lain seperti *framing* Gamson dan Modigliani, Robert N. Etman maupun Murray Edelman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Cetakan kesatu. Yogyakarta: Lkis
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2001. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan Universitas Muhammadiyah Malang
- Kartodirjo, Sartono, A. Sudewo dan Suharjo Hatmosuprobo. 1987. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kriyantoro, Rachmat 2007. *Teknik Praktis riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- May Lan. 2002. *Pes, Negara & Penguasa: Refleksi Atas Praktik Jurnalisme Gender Pada Masa Orde Baru*. Yogyakarta: Kalika
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa kini*. Jakarta: Rajawali Pers
- Partokusumo, H. Karkono Kamajaya. 1995. *Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Islam*. Yogyakarta: IKAPI
- Setiati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Yogyakarta: Andi Offset

Shoemaker, Pamela J dan Stephen D. Reese. 1996. *Mediating The Messages:*

Theories Of Influences On Mass Media Content. Second Edition.

USA:Longman Publisher

Siregar, Ashadi., Rondang Pasaribu, dan Ismay Prihastuti (ed). 2000. *Eksplorasi*

Gender Di Ranah Jurnalisme dan Hiburan. Forf Foundation. LP3Y

-----, Ashadi dkk. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media*

Massa. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Sobur,Alex.2006. *Analisis Teks Media: Suatu pengantar untuk Analisis Wacana,*

Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung:Remaja Rosdakarya

TULISAN TIDAK DITERBITKAN

Iswara, Lungguh Ginanjar .2010. Pencitraan Sri Sultan Hamengku Buwono X

dalam SKH Kedaulatan Rakyat. (*Analisis Framing Pencitraan Sri Sultan*

Hamengku Buwono X di Headline Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat

Terkait dengan Pernyataan Ketidakbersediannya Menjadi Gubernur DIY.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi

Eprilianty, Lidwina Chometa Halley.2009. Framing Opini Masyarakat tentang

Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY. (*Analisis*

Framing Media atas Opini Narasumber sebagai representasi Masyarakat

tentang Polemik Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Periode 2008-2013 dalam SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH

Bernas Jogja .Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya
Yogyakarta. Skripsi

Mahargyaningtyas, Yudit. 2010. Polemik Pengusulan Hak Angket Kasus bank
century Dalam Surat Kabar Harian Umum Jurnal Nasional. *Analisis
Framing pemberitaan Polemik Pengusulan Hak Angket Kasus Bank
Century dalam SKH Umum Jurnal Nasional edisi 13 November-1
Desember 2009*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma
Jaya Yogyakarta. Skripsi

Palmasari, Fransiska Marta. 2007. Relokasi Kawasan Parangtritis dalam Surat
Kabar (*Analisis Framing Pemberitaan Relokasi Kawasan Parangtritis
dalam Surat Kabar kedaulatan Rakyat dan Bernas Jogja*). Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi

SUMBER LAIN

Company Profile SKH Kedaulatan Rakyat 2010

SKH Kedaulatan Rakyat Kolom Analisis *Perempuan Raja*. 27 Mei 2010



LAMPIRAN

KR edisi 15 Mei 2010

Sri Sultan HB X Soal Suksesi Kraton

Raja Yogya Bisa Perempuan

YOGYA (KR) - Kraton Yogyakarta kini bukan lagi sebuah kekuatan politik seperti dulu. Kraton tidak bisa lepas dari masyarakat. Termasuk dalam hal suksesi kepemimpinan, aspirasi masyarakat juga dipertimbangkan. Sentimen *paugeran*, kedudukan sebagai raja memang dijabat oleh laki-laki. Tapi jika tuntutan masyarakat berubah, maka peluang perempuan menjadi pemimpin kraton pun terbuka.

Hal itu dikatakan Raja

Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada wartawan di Kepatihan, Jumat (14/5). Pernyataan tersebut terkait dengan pandangan Sultan mengenai gender yang disampaikan kepada tiga mahasiswa Fkipol UGM yaitu Syaifa Achidadi, Yusuf Akmal dan Reno Kinanti. "Kita tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Tapi di Kraton kan ada *paugeran* (selama ini yang menjadi raja laki-laki).

Sekarang masyarakat tun-

tutannya apa," kata Sultan.

Kalau kemudian masyarakat menghargai laki-laki sama dengan perempuan dan menginginkan kondisi berubah, maka hal itu bisa jadi pertimbangan. "Tersebut masyarakat yang punya aspirasi," tutur Sultan. Secara pribadi, lanjutnya, di tengah semakin menguatnya isu gender pihaknya tidak boleh membedakan laki-laki dan perempuan.

Menanggapi pernyataan Sultan, Sosiolog UGM Arie

Sujito berpendapat, itu merupakan sinyal Sultan untuk mengestimasi kemungkinan Pembayun menjadi pengganti. Sultan membuka wacana untuk memancing tanggapan masyarakat. "Sultan melempar bola ke publik, menantang perdebatan di masyarakat yang pasti akan timbul pro dan kontra. Sultan akan melihat bagaimana wacana itu berkembang, lalu melakukan manuver baru," katanya.

***Persambung hal 32 kol 1**

Raja-raja Kraton Yogyakarta			
Nama	Gelar	Bertahia	
Sendara Raden Mas Bujana	Hamengubuwono I	1796 - 1799	
Sendara Raden Mas Bundero	Hamengubuwono II	1799 - 1812	
Sendara Raden Mas Burejo	Hamengubuwono III	1812 - 1814	
Sendara Raden Mas Bujur Jarak	Hamengubuwono IV	1814 - 1823	
Sendara Raden Mas Rafat Menul	Hamengubuwono V	1823 - 1836	
Sendara Raden Mas Murdjo	Hamengubuwono VI	1836 - 1877	
Sendara Raden Mas Mulayyo	Hamengubuwono VII	1877 - 1921	
Sendara Raden Mas Sujat	Hamengubuwono VIII	1921 - 1939	
Sendara Raden Mas Dorogatan	Hamengubuwono IX	1940 - 1988	
Sendara Raden Mas Herjuno Darpito	Hamengubuwono X	1988 - sekarang	

KR edisi 16 Mei 2010

Kalau Inginkan Raja Kraton Yogya Perempuan

Harus Berani Tinjau 'Paugeran'

YOGYA (KR) - Wacana soal raja perempuan mengundang reaksi dari banyak pihak. Dari segi sejarah, Kraton Yogyakarta memiliki nilai historis tinggi, sehingga kraton harus dijaga. Maka, *paugeran* atau *nger-anger* yang merupakan undang-undang kerajaan perlu dihormati jika masih ingin mempertahankan tradisi dan jati diri kraton. Di sisi lain, seiring dengan san-
teranya isu gender keberada-

an pemimpin perempuan bukan hal tabu lagi. Sejarawan UGM Drs Adaby Darban SU mengatakan, kalau hanya sebatas wacana pendapat raja perempuan boleh saja. Namun untuk aktualisasinya perlu dipikirkan lebih lanjut dan bijaksana. Sebab mengangkat raja dari gender perempuan berarti harus ada keberanian untuk meninjau *paugeran* yang sudah diterapkan sejak dulu. "Langkah ini akan meng-

undang persoalan," kata Adaby kepada *KR*, Sabtu (15/5). Dikemukakan, sejak berdirinya Kraton Yogyakarta hingga sekarang belum pernah ada raja perempuan. Kecuali kerajaan Hindu di Jawa memang pernah dipimpin perempuan, seperti Raja Kalingga. Sedang untuk Kerajaan Mataram belum pernah ada raja perempuan. Namun demikian pihaknya tetap menghormati pendapat

yang dikemukakan Sultan. "Sultan melontarkan itu kan baru wacana. Bukan pendapat yang harus bisa berubah," ujarnya. Adaby menilai, keberadaan Kraton Yogya sekarang ini sudah bagus. Kraton dihormati oleh masyarakat dan kewibawaannya pun masih baik. "Agar kewibawaan kerajaan tidak pudar maka jati diri kraton perlu dipertahankan. Sebab kalau tidak, bisa *gonjang-ganjing*,"

ujar Adaby. Kebijakan kraton yang mengakomodir aspirasi masyarakat dalam suksesi memang tidak ada salahnya. Namun jika persoalan kraton kemudian diserahterahkan pada persepsi masyarakat pada persiapan masyarakat luas, kesiapan kraton pun perlu dipertanyakan. "Mungkin nanti ada yang mengusulkan agar dilaksanakan pemilihan raja dan sebagai-nya. Apakah kraton sudah siap," ujarnya. Sebab itu

akan lebih baik jika persoalan suksesi diendapkan dulu agar tidak menimbulkan gejolak. Apalagi persoalan RUUK DIY juga belum selesai. Pakar politik UGM Prof Warsito Utomo mengatakan, dari sisi sejarah raja perempuan di Indonesia sudah pernah ada yakni Kerajaan Kalingga yang dipimpin Ratu Sima. Sebab itu ia tidak memperlakukan adanya

* Bersambung hal 23 kol 5

Harus Berani ✓.....

raja perempuan. "Hanya saja persoalan bagaimana *paugeran* dan kesepakatan aturan lingkup Kraton Ngayogyakarta itu sendiri. Dan jangan dikaitkan keberadaan gubernur di pemerintahan daerah dengan persoalan yang berhubungan dengan kraton," paparnya.

Permasalahan yang akan muncul diprediksikan Warsito yakni pengkaitan dan pengkonotasian menduduki tahta sebagai raja namun secara otomatis menjadi Gubernur DIY. "Tinggal nantinya yang mau dipakai UU yang mana," terangnya.

Dalam UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan di DIY diatur mengenai kekhususan dan keistimewaan bahwa yang menduduki jabatan kepala daerah didasarkan atas keturunan Sultan dan wakil kepala daerah didasarkan atas keturunan Paku Alam. "Hal ini juga bisa ditafsirkan, keturunan Sultan tidak hanya sebatas anak saja namun bisa

juga dari keturunan lain misalnya keponakan," terangnya.

Secara pribadi, imbuh Warsito ia tidak mempermasalahkan keberadaan raja maupun gubernur perempuan. "Saat ini posisi perempuan tidak hanya pada *level* bupati saja. Jadi gubernur mengapa tidak," tanyanya.

Aktivis gender dan juga pengurus Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Nahi'ah J Faraz justru menyambut gembira serta mendukung apabila wacana raja perempuan tersebut segera terealisasi. Senada dengan Warsito, ia beralasan dilihat dari aspek sejarah keberadaan raja perempuan sudah ada sejak lampau, selain itu saat ini sudah bermunculan tokoh-tokoh calon pemimpin perempuan baik dalam pilukada serta lainnya. "Jadi keberadaan pemimpin perempuan bukan merupakan hal yang tabu dewasa ini," tegasnya.

Secara pribadi, Nahi'ah berpendapat apabila muncul sosok pemimpin perempuan dari kraton merupakan sesuatu yang luar biasa, karena memiliki nilai positif dengan adanya perubahan nilai dan cara pandang.

"Kalau ini terjadi berarti terjadi revolusi cara pandang sebagai perempuan. Dari lingkungan kraton muncul sosok pemimpin perempuan, maka keadilan gender di lingkungan kraton sudah terjawab. Dan hal ini akan mengakar sampai ke tingkat *grass root* masyarakat," paparnya.

Sedangkan kerabat kraton GBPH Prabukusumo enggan memberikan komentar soal suksesi kraton. "Saya tidak berani komentar. Biar masyarakat saja yang menilai. Ditanya saja tokoh-tokoh masyarakat bagaimana," katanya. Apakah internal kraton menerima kehadiran pemimpin perempuan, Prabukusumo juga tidak bersedia memberikan pendapat.

(Ast/M-1/R-3)-b

KR edisi 18 Mei 2016

Romo Tirun: Pengganti Sultan Masih Misterius

Siapa pengganti Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi Raja Kraton Yogyakarta? Menurut kerabat Kraton H RM Tirun Marwito SH masih misterius. Tapi yang pasti, menurut pangeran dan pranian, harus laki-laki, kata cucu Sultan HB VIII saat bersilatrahni dengan Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat Drs HM Romli, Senin (17/5).

LEBIH jauh Romo Tirun, panggilan akrab H RM Tirun Marwito menegaskan, gelar Sayidin Panatagama Kalifatullah hanya disandang oleh kaum pria, yang berarti Penghulu/Pembesar/ Yang Dipertuan Agung dalam mata kehidupan beragama dan pemberian amanat Allah SWT. "Tidak mungkin

Peralatan Upacara yang berkaitan dengan sifat dan karakter Sultan sebagai laki-laki sejati:

A. Kanyang Kyai Upacara, terdiri:

1. **Banyak (Angsa)** berbulu putih melambangkan kesucian dan kewaspadaan.
2. **Dhalang** berarti kijang, simbol kegigihan dan kebijaksanaan. Seorang Sultan harus gesit dalam berpikir dan bijaksana dalam mengambil keputusan dan tindakan.
3. **Sawung**, berarti ayam jantan yang merupakan lambang simbol keberanian.
4. **Galing** atau burung merak merupakan simbol dari keindahan dan kewibawaan.
5. **Hardawalka**, atau naga, di dalam mitologi Jawa adalah penyangga, pembawa dunia. Artinya, seorang Sultan adalah pembawa dan penanggung jawab.
6. **Kacu Mas**, atau sapu tangan emas, merupakan simbol dari penghapusan segala kotoran jasmani maupun rohani.
7. **Kuduk**, berarti tempat uang (berbentuk kotak) yang melambangkan seorang Sultan harus lebih banyak memberi dari pada menerima.
8. **Kandili**, atau lentera, melambangkan seorang Sultan harus dapat memberi pencerahan atau penerangan di hati rakyat.

B. Pisaka, antara lain berupa Waos (tombak).

seorang imam dalam Islam Marwito mengatakan, gelar Sayidin Panatagama Kalifatullah hanya disandang oleh kaum pria, yang berarti Penghulu/Pembesar/ Yang Dipertuan Agung dalam mata kehidupan beragama dan pemberian amanat Allah SWT. "Tidak mungkin

angkat sebagai Sultan dan berhak atas setengah dari wilayah kerajaan Jawa dengan gelar *Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah*.

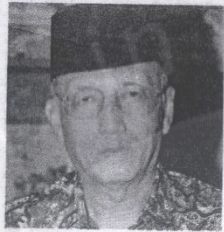
• Bersambung hal 23 kol 1

SUNGGUH SUNGGUH Terjadi

● **GEDUNG Olah Raga (GOR)** yang paling panas di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia, ternyata ada di Kebumen. Namanya **serem**, yaitu... *Condrodimuko*. — (Kirimkan: Drs Krimanto, Jalan Bogowonto 10/97, RT 05 RW 01, Wero, Gombong 54416, Jawa Tengah)-b

Romo Tirun: ✓

Sambungan hal 1



KRI-FRANS BOEDISUKARNANTO
HRM Tirun Marwito dan Ir Yuwono Sri Suwito MM

Di samping keabsahan, kekuasaan Sultan atas setengah dari wilayah Kerajaan Jawa, Sultan HB I juga diberikan hak suksesi bagi keturunannya yang sah, yaitu Adipati Anom, Mas Sundoro dan Ingabehi. "Dengan demikian sejak pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I, suksesi pengganti Sultan setelah wafat adalah putra laki-laki, diurutkan dari putra la-

ki-laki tertua dari permaisuri," katanya.

Jika tidak ada putra laki-laki maka sesuai dengan aturan dan tatacara di Kraton Yogyakarta maka penerusnya adalah adik laki-laki dari raja yang bertahta. Namun saya tegaskan, suksesi maupun raja di Kraton Yogyakarta saat ini masih misteri," kata Yuwono Sri Suwito. (Apw)-b

Sedangkan pengamat hukum, Achiel Suyanto SH menilai, secara etis tidak pas membicarakan suksesi ketika raja saat ini masih *jumengeng*. Munculnya wacana raja di Kasultanan Yogyakarta bisa perempuan telah menimbulkan perdebatan.

* Bersambung hal 23
kol 5

sebagai Cemani Jalu jati.
Cemani : Ayam hitam yang sangat berguna
untuk kepentingan upacara.
Jalu : laki-laki.
Jati : lelaki.

FOR CITY WITH NO BULLDOZERS: 105



Interview Guide SKH Kedaulatan Rakyat

Pertanyaan Umum

1. Sejarah SKH KR
2. Rutinitas di SKH proses pra peliputan, liputan dan pasca peliputan
3. Bagaimana sistem seleksi berita di KR
4. Bagaimana sistem distribusi di KR
5. Bagaimana Sistem rapat redaksi dan kebijakan redaksi
6. Bagaimana penentuan sebuah berita masuk pada halaman tertentu
7. Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan suatu peristiwa atau wacana layak diberitakan?
8. Pandangan KR mengenai wacana perempuan sebagai Raja Kraton Yogyakarta

Pertanyaan Redaksi

1. Bagaimana redaksi dalam masalah ini?terkait dengan wacana perempuan raja kraton?
2. Bagaimana pandangan anda pribadi terkait dengan wacana ini?
3. Mengapa berita ini ditempatkan pada halaman pertama dan menjadi headline?
4. Aspek mana yang ditonjolkan terkait dengan wacana tersebut? Dan aspek mana yang dikaburkan?
5. Apakah ada kebijakan redaksi terkait dengan pemberitaan mengenai wacana perempuan sebagai Raja Kraton?
6. Apakah tujuan redaksi menempatkan berita-berita mengenai wacana perempuan sebagai raja kraton di halaman muka dan menjadi headline?
7. Apakah media anda menampilkan narasumber dari dua pihak??pihak yang mendukung atau menolak??
8. Apa yang berusaha di tonjolkan oleh media anda terkait dengan wacana perempuan sebagai raja kraton??

9. Bagaimana cara media anda menonjolkan suatu wacana atau narasumber baik yang mendukung atau menolak wacana perempuan sebagai raja kraton?
10. Apakah tujuan media melakukan pembingkaihan terhadap wacana perempuan sebagai raja kraton? Apa yang diharapkan terhadap respon pembaca?
11. Apakah orientasi dari media anda?
12. Apakah semua pernyataan narasumber di tampilkan dalam berita?? Pernyataan apa yang tidak boleh ditampilkan??
13. Apakah ketersediaan *space* mempengaruhi isi berita?
14. Bagaimana cara penentuan judul dan sub judul dalam KR
15. Apakah ada maksud tertentu dalam setiap judul dan sub judul dalam setiap pemberitaan KR?
16. Apakah ada aturan dari redaktur dalam menentukan narasumber?
17. Berapa narasumber yang diperlukan untuk membuat berita mengenai wacana perempuan raja kraton??
18. Apakah ada aturan mengenai panjang pendeknya berita yang ditulis wartawan?'
19. Apakah wartawan yang meliput mengenai wacana ini ditentukan oleh redaktur atau ada cara lain?
20. Mengapa Kr cenderung memilih narasumber yang berasal dari pakar sejarah dan politik??
21. Mengapa KR cenderung menyajikan berita yang menolak mengenai wacana tersebut dan menampilkan berita yang menginginkan mempertahankan paugeran?
22. Mengapa berita *headline* ditulis oleh banyak wartawan??
23. Kebijakan membuat grafis siapa yang membuat?? Apa fungsinya grafis atau foto yang digunakan dalam artikel?
24. Apakah hidup dalam lingkungan dengan struktur opatriarki berpengaruh pada berita yang dihasilkan?

Pertanyaan Wartawan

1. Sejauh mana anda mengetahui mengenai wacana tersebut?
2. Bagaimana pandangan anda mengenai wacana tersebut?
3. Bagaimana Pendapat anda mengenai wacana perempuan Raja Kraton?
4. Menurut Anda pantaskah seorang perempuan menjadi Raja Kraton?
5. Menurut anda mampukah perempuan memimpin suatu kerajaan atau kasultanan?
6. Apakah anda setuju mengenai wacana perempuan sebagai Raja Kraton Yogyakarta?
7. Bagaimana pendapat Anda mengenai paugeran yang mengharuskan pengganti Sultan adalah laki-laki?
8. Bagaimana tanggapan anda mengenai amandemen paugeran di dalam kraton??
9. Apakah ada kebijakan redaksional dalam pemberitaan?
10. Bagaimana implementasi kebijakan redaksional dalam memberitakan mengenai wacana tersebut?
11. Apakah kecenderungan atau keberpihakan dalam pemberitaan yang ada buat berdasarkan kebijakan redaksional? Mengarah kemana kecenderungan dan keberpihakannya ?
12. Bagaimana tanggapan anda mengenai netralitas dalam sebuah berita?
13. Bagaimana penentuan narasumber yang anda gunakan untuk menjelaskan permasalahan ini?
14. Apakah judul dan sub judul anda yang membuat? Atau pihak redaktur?
15. Jika anda yang membuat apa maksud dari judul dan sub judul yang anda buat?
16. Bagaimana penentuan urutan narasumber yang anda tulis ke dalam teks berita?
17. Apakah ada aturan mengenai panjang pendek berita?
18. Bagaimana penentuan lead dan paragraph penutup dalam berita yang ada tulis?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Drs. Hudono, SH
Jabatan : Redaktur Pelaksana
Tempat : Kantor Redaksi KR
Waktu : 28 Maret 2011, Pukul 21.00 – 22.00 WIB

Keterangan

P : Peneliti

H: Drs. Hudono, SH

P: Bagaimana dengan sistem berita di KR sendiri ?

H: E.. kita memang menerapkan beberapa persyaratan dan persyaratannya sanga-sangat umum . artinya seprti teori jurnalistik ya semacam nilai berita, mana nilai beritanya yang paling kuat. Kalau nilai beritanya kuat, itu yang kita pilih. Ada macam-macam nilai berita, ada aktualitas, prominence, proximity, dan sebagainya. Ya itu tetap kita gunakan sebagai acuan, karna ini koran lokal ya, koran Yogya maka lebih mendekatkan dengan masyarakat Yogya. Jadi kalau ada berita yang bersetuhan dengan kepentingan publik, nilai beritanya lebih tinggi. Itu kita pertimbangkan penempatannya pada halaman muka.

P: Apakah itu yang menjadi penentuan *headline*?

H: Ya tentu saja begitu. Berita yang paling penting, paling berdampak pada masyrakat itu kita pilih menjadi berita headline. Begitu seterusnya tingkat kepentingannya semakin kurang maka di bawah levelnya. Tapi untuk menentukannya memang kita ada rapat redaksi atau diskusi karena persepsi masing-masing kan beda. Kan perlu rapat, memilih kira-kira mana, kasus korupsi dengan RUUK itu penting mana misalnya seperti itu. Kepentingan publiknya sama- sama besat, hanya saja permasalahan RUUK DIY lebih dekat dibanding dengan kasus gayus walaupun sama-sama memiliki nilai berita yang cukup tinggi bobotnya itu. Saya pikir seperti itu.

P: Mengapa Wacana perempuan Raja Kraton dianggap menarik dan layak diberitakan KR ?

H: Tentu saja yang pertama itu, tadi itu sudah ya seperti yang saya bilang soal kepentingan publik. Yang aktual tentu saja yang saat ini sedang jadi perbincangan di masyarakat, terutama masyarakat Yogya bahkan masyarakat nasional. Anatar itu tadi kalau sekrang ada RUUK dan masyarakat punya pendapat soal penentapan, maka aspirasi itu menjadi penting untuk diketahui oleh pusat sehingga kita menempatkannya pada posisi yang lebih luas ketimbang berita-berita biasa yang untuk masyarakat DIY. Nah mungkin bukan sekedar wacana ya, itu memang sudah implementatif artinya bisa dirasakan langsung oleh warga DIY, bahwa mereka butuh kepemimpinan. Kan kepemimpinan DIY hampir usai, secara aturan memang sebenarnya sudah diperpanjang-panjang terus kan? Nah itukan salah satu penyebab kekosongan kekuasaan, itu nggak boleh kan dalam sistem

ketatanegaraan. Sehingga masyarakat sangat berkepentingan, siapapun, siapa yang sebetulnya punya hak untuk menduduki orang No 1 di DIY, saya pikir itu.

P: Bagaimana pandangan Anda terkait wacana perempuan Raja Kraton?

H: Ya sebenarnya saya mau balik bertanya, apa yang anda persepsikan tentang pemberitaan itu. Apa setelah media mengekspos wacana mengenai pemimpin perempuan, perempuan yang menjadi pemimpin, yang kemudian itu cukup mengehebohkan, kita sebenarnya pingin tahu sie bagaimana reaksi publik atau reaksi pembaca seperti itu, tentu ini bisa diharapkan bisa menjadi masukan, dan kemudian ketika saya harus menjawab tanpa adanya penelitian, maka banyak asumsi-asumsi yang harus saya bangun. Misalnya ketika tidak ada reaksi tidak ada protes tidak ada demo. Untuk wacana satu itu positif,

Karena nilai-nilai demokrasi itu, itu memang bisa dibangun terlebih dahulu dengan menyerap aspirasi masyarakat. Ada yang punya aspirasi bahwa raja atau pemimpin itu adalah laki-laki., itu sudah masuk dalam kesetaraan gender. Tapi kemudian ada tatanan sosial, tatanan yang lebih khusus lagi di kraton. Di kraton itu ya nampaknya, yang paling berkuasa adalah raja dan raja itu dan raja adalah laki-laki. Sehingga tapi sengaja biarlah wacana itu bergulir, nanti persepsi atau reaksi daripada kraton silahkan dipilih, karena mereka sendiri internal yang membuat aturan bukan masyarakat. Jadi masyarakat tidak membuat tatanan kraton, tapi internal mereka sendiri. Bolehkan memang tatanan itu diubah, ya tentu saja silahkan saja. Artinya kalau memang itu kompeten untuk mengubah ya masyarakat memang tidak bisa memaksa-maksa atau memaksakan kehendaknya, harus diserahkan pada kraton itu sendiri.

P: Dengan pertimbangan apa berita mengenai wacana ini menjadi *headline*? Tujuan redaksi menempatkan berita itu menjadi *headline* apa?

H: pertama sangat-sangat menarik ya, karena itu tidak pernah dimunculkan dan ada kesan tanda kutip itu tabu, kenapa tabu pak? Ya kan masyarakat Jawa yang sepertinya belum bisa menerima kalau pemimpin itu perempuan kan gitu, apalagi di lingkungan kraton nampaknya belum bisa menerima. Topik itu munculnya nampaknya sangat menarik dan pers itu membawa misi untuk mencerdaskan untuk membuka apa membuka wawasan yang semula tertutup menjadi terbuka, intinya pers itu mencerdaskan masyarakat. Dengan kerena itu diharapkan bisa masyarakat atau keluarga kraton sendiri, apa ya ada pengetahuan baru ada wacana baru yang tak pernah disinggung sebelumnya. Jadi inikan menarik. Berita itu kan harus menarik, salah satu nilai berita kan menarik, masih hangat, mengandung konflik, kontroversial, itu kan masuk dalam kriteria berita.

P: Apakah narasumber yang ditampilkan KR dari pihak pro dan kontra?

H: Saya pikir iya. Akhirnya pengemasan berita ada yang setuju dan ada yang tidak. Artinya perdebatan itu kami pelihara. Dalam rangka membangun demokratisasi, dan tidak ada kemudian yang memaksakan kehendak. Sehingga akhirnya itu semacam menjadi PR yang harus digulirkan oleh kalangan kraton sendiri, apakah mereka dalam tanda kutip rela menyerahkan kepemimpinan itu

kepada perempuan, dan kita juga meminta beberapa pendapat antara lain dari kalangan perempuan ya, yang sering memperjuangkan mengenai kesetaraan gender, ya tentu mereka sangat setuju. Dan mereka yang sudah memegang budaya turun-temurun nampaknya masih agak sulit. Tapi tetep wacana itu diterima sebagai bahan diskusi, belum bisa aplikatif. Karena tatanan yang ada belum memungkinkan, tapi bukan tidak mungkin suatu saat terjadi. Kita lihat misalnya Sultan HB X tidak memiliki anak laki-laki. Perdebatannya di situ, apakah kemudian harus laki-laki, bagaimana seandainya putri Sultan yang secara kemampuan intelektual lebih tinggi dibandingkan yang lain apakah putri Sultan punya hak, itu kan masih ada yang harus dilakukan.

P: Apa yang berusaha ditampilkan oleh media KR sendiri dengan wacana perempuan raja Kraton? Apa yang ditekankan KR?

H: Sebenarnya kita ingin ada kedewasaan berfikir, ada wawasan baru yang membuka mata masyarakat bahwa kesetaraan gender ini sudah mulai digulirkan lagi, dan factor kepemimpinan itu memang tidak mudah. Tidak hanya didasarkan pada jenis kelamin. Itu yang coba ditampilkan oleh KR. Kalau Kr tidak menampilkan itu memang bisa ya, memang ya itu ada misi sosial yang harus diemban oleh media untuk mencerdaskan masyarakat. Bahwa itu kemudian tidak diterima memang fakta sosialnya seperti itu, belum bisa menerima kehadiran perempuan sebagai pemimpin,

P: Apa orientasi dari media KR sendiri?

H: Ya tentunya kedepan. Pemimpin masa depan, tidak hanya besok, suksesi di kraton saja, tidak seperti itu namun bisa bertahun-tahun yang akan datang. Bisa memikirkannya jauh ke depan. Bahwa ada model-model kepemimpinan yang harus melibatkan perempuan misalnya, bahwa pandangan laki-laki harus memimpin, perempuan harus dibelakang itu tidak relevan lagi. Ya orientasinya seperti itu biar *fair*, memang untuk membangun itu tidak gampang karena persepsi yang berbeda-beda sehingga harus didiskusikan kepada masyarakat karena masyarakat lah yang berhak tahu siapa yang akan memimpin mereka,

P: Apakah semua narasumber ditampilkan dalam sebuah berita? Bagaimana yang layak ditampilkan dalam sebuah berita?

H: Tidak harus ditampilkan dalam sebuah berita. Kalau anda amati, itu juga ada dalam artikel atau opini memang ada perbedaan yang jelas ketika tulisan masuk dalam halaman opini, maka itu betul-betul pendapat pribadi dari masing-masing penulis. Dan media berhak untuk menentukan kelayakan dari pendapat tersebut, sehingga boleh jadi pendapat yang saling bertentangan itu ditampilkan, yang tidak harus sama, masyarakat yang protes dengan argumentasi yang cukup kuat kita pertimbangan pemuatannya.

P: Apakah keterbatasan *space* mempengaruhi penempatan sebuah berita, panjang pendeknya berita?

H: Tentu-tentu sangat mempengaruhi ya. Kita memang dibatasi bukan saja dengan waktu atau deadline, tapi juga space, ada iklan misalnya seperti itu, yang

kemudian datang dengan tiba-tiba, sehingga mengurangi porsi berita, sehingga kita tidak bisa kemudian, membuang iklan, itu tidak mungkin ya, itu nafas dari media, dan yang lebih penting adalah substansi. Gimana berita yang sangat panjang, kita memampatkan agar sarinya masuk dan ini adalah kemahiran seorang redaktur, bagaimana dia membuat berita yang cukup panjang, menjadi sangat singkat, namun substansinya bisa masuk.

P: Siapa yang berhak menentukan judul dan sub judul dalam sebuah berita??

H: Judul itu kami sebenarnya mendorong semua reporter untuk membuat judul, silahkan reporter loe buat judul, karena you yang paling tahu apa yang anda tulis. Kemudian di meja redaksi akan berbeda karena judul harus pendek. Judul harus mencerminkan isi, itu tidak bisa kita simpangi, judul harus mencerminkan isi, karena ini media cetak maka space ya itu kita lihat sendiri memang sangat-sangat terbatas. Sekitar 2, 3, 4 , kolom dan sebagainya. Sebisa mungkin judul itu singkat ya. Bisa jadi judul yang disampaikan wartawan itu bagus kemudian, spacenya memadai dan cukup tidak terlalu lembut, tidak terlalu kecil maka kita bisa palai judul yang diajukan wartawan.

P: Apakah redaktur menugaskan wartawan mencari narasumber yang sudah ditentukan?

H: kita tidak seperti itu, tidak mengharuskan untuk a, b, c,d tapi kita memberikan gambaran paling tidak kalau anda mau menulis soal RUUK/wacana perempuan raja kraton maka dia punya kompetensi untuk ngomong jadi bukan asal narasumber tidak bisa. Karena kredibilitas narasumber juga diperhitungkan. Orang ini jujr apa nggak, itukan sebenarnya karakter yang bisa dinilai, ketika orang itu sering berbohong, sesungguhnya sudah tidak layak dijadikan sebagai narasumber. Kemudian itu terkait dengan kompetensi, narasumber ahli, karena ya adalah narasumber ahli tapi ngomongnya nggak bener juga ada. Kemudian kalau kita cari grass root misalnya, maka kita ada penelitian kecil-kecilah, kayak polling itulah siapa narasumber yang paling dominan. Kalau Jogja masyarakat kaki lima misalnya, ya kita ambil sampel 1,2,3 eh lainnya lagi mungkin petani,

P: sesuai kebijakan redaksi berapa narasumber yang dianjurkan dalam sebuah berita?

H: Ya kalau dari aspek jumlah sie, sebenarnya kita tidk membatasi harus secara ketat nggak, tapi kalau itu terkait dengan wacana yang kemudian menjadi perdebatan, maka paling tidak ada dua pihak yang dihubungi, cover both side, atau cover all side, itu semuanya dihubungi sehingga beritanya imbang. Orang membaca akan mengetahui pendapat yang pro sekaligus dia akan mengetahui pendapat yang kontra. Kemudian disisakan ada argumen yang disampaikan oleh masing-masing itu sehingga masyarakat itu akan bisa menilainya. Tidak bisa kemudian saya sangat suka yang pro maka mencari narasumber yang pro,

P: Apakah penentuan 2 narasumber dalam berita untuk mendukung netralitas dalam sebuah berita?

H: Ya begini yah, sebenarnya media itu tidak harus netral, bahwa media itu harus independen iya. Media itu harus independen. Independensi itu apa sie artinya? Artinya dia itu punya kebebasan untuk netral dan berpihak. Ketika masyarakat itu kekurangan bahan makanan, tidak bisa mendapatkan akses untuk mencari bahan makanan, maka media harus berpihak. Media berpihak pada siapa? Pada penderitaan rakyat kan seperti itu. Tapi kemudian kalau ada konflik Sara, umat yang kemudian bertempur, kemudian mau apa? Apakah mau berpihak? Tentu tidak. Media akan netral. Sikap netral dan tadi itu adalah bagain dari independensi.

P: Bagaimana sikap KR terkait wacana perempuan Raja Kraton Yogyakarta ??

H: Kalau KR sendiri netral ya, karena meskipun nanti penilaian anda berbeda ya, bisa saja kalau dari beritanya kug isinya seolah mendukung, karena barang kali mayoritasnya kurang mendukung. Namun kita juga menampilkan bagaimana pihak yang mendukung. Artinya aspirasi yang kemudian diperlihatkan di publik dan diekspos media ya sah-sah saja. Karena itu bagain dari demokrasi yang tidak bisa kemudian itu diredam. Kalau kemudian ternyata berdampak yang terjadi aksi anarkhis, itu lain soal, maka kemudian kita mengangkat berita aksi-aksi anarkhis itu yang ternyata mencederai demokrasi.

P: Mengapa berita yang menjadi headline ditulis oleh 2 /3 wartawan?

H: Tentu saja kita ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya dengan space yang terbatas maka ini dari aspek praktis saja sebenarnya dengan lebih banyak melibatkan wartawan. Maka hasilnya akan maksimal. Bisa mencari narasumber dengan cukup banyak dan berimbang. Tapi kalau hanya satu, saya tidak yakin, wartawan itu bisa mengcover semuanya.

Ya karena ini persoalan yang tidak ringan kan gitu, apalagi kita terbatas dengan waktu, jangan sampai kemudian menjadi basi atau kemudian menjadi tertunda, jadi hari itu harus selesai kan. Bisa 3,4 bahkan 5 orang wartawan sangat mungkin.

P: Bagaimana dengan kebijakan redaksi terkait dengan grafis? Siapa yang menentukan? Dan apa tujuannya?

H: grafis itu untuk mempermudah pembaca untuk membaca suatu fakta, peristiwa atau fenomena. Untuk memudahkan sebenarnya,. Nah itu bisa berasal orang yang meng grafis (pekerjaannya menggrafiskan juga ada) atau juga bisa dari redaksi sendiri sudah punya rancangan dan nanti berita apa, point-point apa yang akan dibuat grafisnya. Setelah didapatkan maka akan diteruskan pada tim grafis.

Pemuatan sebuah foto juga hamper sama tujuannya dengan pemuatan grafis. Meskipun di sini ada redaktur foto, tapi harus didiskusikan juga karena foto tidak hanya sekedar foto itu indah, bagus dan sebagainya, tapi substansinya juga bisa masuk. Kalau itu foto kemudian melanggar etika, kan juga repot. Dia harus terbukti yang terkait dengan pemuatan foto. Itupun secara dominan mereka sendiri yang menentukan yang berinisiatif ini lho foto bagus. Foto bagus apapun kalau kemudian di rapat redaksi ini tidak layak, dan ini takut bermasalah ya cabut.

P: Apa maksud dari judul *headline* besar dan sub judul yang kecil? Mengapa ada dua judul?

H: Ya inikan sebenarnya yang lebih besar, lebih tebal itu lebih penting. Kalau judul yang di atas ini hanya sebagai navigator, navigator untuk menjelaskan apa sie ini kaitannya dengan apa sie, kalau orang baca dari jauh “Raja Yogya Bisa Perempuan” sebenarnya sudah cukup, sudah tahu. Di edarkan di masyarakat orang satu Yogya bisa tahu dan langsung dong kan itu, sberulya Sultan BH soal suksesi Kraton inikan sebetulnya hanya penjelas aja, navigator aja. Jadi judul yang atas tidak harus ada. Itu hanya untuk memperjelas saja dalam konteks apa, o terkait dengan suksesi.

P: Apakah kedekatan dengan kraton Yogya mempengaruhi pemberitaan?

H: Kalau kedekatan memang sejak dari dulu. Kedekatan itu juga bisa diartikan mengkritisi, karena kita tidak bisa membiarkan kraton menjadi kaku misalnya, maka kita mengkritisi kraton, mengkritisi perilaku pangeran di kraton misalnya, itukan bagian dari kedekatan juga untuk membangun kebersamaan. Dan selama ini tidak ada masalah, mengkritik pangeran di kraton itu tidak masalah, mereka bisa menerima, asal yang kemudian kita lakukan itu dengan cara yang halus dan budaya Yogya ini. Itu yang spesifik yang tidak dimiliki oleh Koran lain. Kalau Koran lain lebih keras, cumin kita menyentil lewat pernyataan sudah terasa, kemudian kita kerasanya mereka lebih peka ketimbang harus dijelaskan secara vulgar.

P: Bolehkan pernyataan narasumber dijadikan sebuah berita?

H: Kalau itu boleh-boleh saja. Kalau kita sangat kuat referensinya, dan kita sudah menyakini bahwa pernyataan narasumber ini mengandung kebenaran maka itu bisa djadikan pilihan judul. Karena itu sangat menarik dan alasannya masuk akal, dan redaksi itu berpendapat itu sangat-sangat bagus, dan memenuhi aspirasi warga Yogya misalnya. Jadi harus ada referensi terlebih dahulu. Kalau ini nampaknya kayak gawe-gawe ya nggaklah kita tidak mengangkatnya sebagai judul.

P: Terkait dengan pemilihan pakar sejarahwan dan politik, apa wacana perempuan raja kraton Yogya ini termasuk dalam permasalahan sejarah dan politik?

H: Ya memang itu bisa dipisahkan dari sejarah. Masyarakat juga perlu tahu, apakah ada sejarahnya perempuan memimpin kerajaan seperti itu, kalau wacananya adalah raja perempuan tadi, ya maka kita perlu menelusuri pakar-pakar sejarah yang secara keilmuan menguasai sejarah berdirinya kraton Yogyakarta.

Wartawan sendiri sebelum bertanya pada seorang ahli sejarah kraton misalnya, dia seharusnya membaca buku dulu, meskipun tidak secara utuh. Paling tidak itu bisa menuntun wartawan untuk menanyakan hal-hal yang sangat substansial, sehingga betul-betul menguasai bidang wartawan itu. Tidak kemungkinan mengajukan pertanyaan yang mungkin sifatnya dangkal, seprti orang yang belum pernah baca sejarah. Nah ini yang coba kami terapkan, sehingga narasumber merasa nyaman bertemu dengan wartaawn yang sangat kritis akan sejarah. Apakah mungkin sejarah itu tidak bisa diubah, apakah pendiri kraton sejak awal

itu, menghendaki raja memang harus laki-laki, apakah benar seperti itu ataukah memang pada saat itu kemampuan untuk memimpin hanya dimiliki oleh laki-laki, bagaimana jika zaman sudah berubah dan kemampuan itu dimiliki oleh perempuan, sedangkan laki-laki ternyata kalah.

P: Apakah KR mendukung mengenai wacana perempuan raja kraton?

H: Itu kan sebatas pendapat, saya secara kelembagaan tidak bisa mengatakan KR setuju atau tidak, tapi paling tidak saya memberikan rambu-rambu untuk suksesi di kraton, kita tetap menggarapkan dilakukan secara demokrasi. Demokrasi itu bukan berarti pemilihan atau penetapan, tapi melibatkan pihak-pihak berkompeten dan memang punya hak. Kalau mereka menghendaki pemimpin adalah laki-laki, dan dari kemampuan juga memenuhi syarat yang ok. Tapi itu juga berarti ya sama dengan yang dulu-dulu, tapi bagaimana kalau perempuan? Kalau perkembangannya sudah berubah, dan masyarakat juga tidak alergi dan sudah punya kedewasaan berfikir berpolitik, sehingga itu bukan hal yang menakutkan. Ya oke saja, silahkan saja. Dalam kaitan itu, KR kemudian tidak mengarahkan, tapi mengawal bagaimana proses demokrasi itu berlangsung. Bahwa pilihan itu bukan di KR nya, tapi kita coba menropong itu, mengawal, proses demokrasi di kraton Yogyakarta itu.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Aksan susanto
Jabatan : Wartawan
Tempat : Kantor Redaksi KR
Waktu : 26 Maret 2011, Pukul 10.30 – 12.00 WIB

Keterangan

P : Peneliti

A: Aksan susanto

P: Sejauh mana Anda mengetahui mengenai wacana perempuan Raja Kraton Yogyakarta ?

A: Wacana ini muncul 1 tahun yang lalu. Pada waktu itu muncul karena masih terkait dengan RUUK Yogyakarta. Dimana kraton harus ..pada waktu itu masyarakat mempertanyakan siapa yang harus menjadi penerus kraton Yogyakarta dari pihak kraton sendiri. Mengingat Sultan HB yang sekarang tidak memiliki anak laki-laki. Karena dalam paugeran itu sendiri atau konstitusi kraton

raja itu haruslah laki-laki. Dan itu juga berlandaskan rentetan sejarah bahwa kraton Yogyakarta adalah turunan dari kerajaan Mataram Islam. Nah sementara itu Sultan HB yang ke 10 yang terkenal sebagai seorang yang demokratis, yang mengakomodasi nilai-nilai demokratis mencoba menggulirkan bahwa raja Yogyakarta itu perempuan. Wacana itu digulirkan sendiri oleh Sultan yang bukan orang lain di luar kraton belum pernah menggulirkan wacana seperti itu. Kemudian wacana tersebut menimbulkan pendapat yang berbeda dari masyarakat. Yang saya tahu memang kerajaan Mataram itu pernah dipimpin oleh seorang perempuan, tapi Mataram saat itu adalah Mataram Hindu. Setelah Mataram Hindu runtuh dan berubah menjadi Mataram Islam. Dalam budaya Islam memang tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Jadi hal itulah yang membuat wacana yang digulirkan Sultan menuai banyak tanggapan. Menurut sejarawan UGM semua itu memungkinkan tapi harus diubah dulu konstitusi kratonnya atau paugeran yang di kraton. Hanya saja kendalanya adalah kraton inikan representasi institusi budaya Islam karena kraton Jogja ini tidak bisa mengingkari fakta sejarah *kalo* dia inikan turunan dari masyarakat Islam. Sehingga apakah mungkin jika raja kraton itu perempuan mengingat budaya Islam yang menganut patriarki ini, sehingga ya itulah yang menjadi pertimbangan.

P: Bagaimana pendapat anda mengenai wacana perempuan Raja Kraton Yogyakarta ini?

A: Ini pendapat pribadi ya, tidak mewakili institusi media. Kalau saya setuju kalau seorang perempuan menjadi Raja. Pendapat saya ini dengan pertimbangan rasional ya. Artinya dari pertimbangan segi humanisme bahwa setiap orang itu memiliki peluang yang sama untuk melakukan apapun termasuk peluang untuk menjadi pemimpin. Beberapa kerajaan di negara lain pun ada yang dipimpin perempuan itu banyak, jabatan publik level manapun faktanya juga banyak, bisa kita lihat seperti presiden, gubernur, bupati hingga ketua RT. Dan juga untuk kerajaan ngayogyakartaadinigrat juga tidak akan jauh berbeda kualifikasinya yang dibutuhkan oleh perempuan sehingga ia layak diangkat menjadi seorang Raja. *Ya* itu pendapat saya persoalan nanti timbul pro dan kontra *ya* tidak tahu.

P: Menurut Anda bagaimana dengan paugeran, seberapa kuat paugeran bagi kraton?

A: Paugeran itu konstitusi, negara ini memiliki UUD, UUD itu juga bisa diamandemen *eh* paugeran pun juga tentu demikian pasti bisa diubah bergantung pada *stakeholder* yang ada di kraton tersebut baik itu raja, kerabat kraton dan warga kraton, saya tidak begitu mengerti..karena kerajaan ini sudah,,istitusinya masih ada tapi saya tidak tahu kekuasaannya masih ada atau tidak.. sehingga ketika tidak ada kekuasaan,otomatis tidak ada yang dikuasai. Ada pemerintahan namun tidak ada rakyatnya, tapi mungkinlah kalau paugeran itu diamandemen.

P: Sulit tidak melakukan amandemen paugeran?

A: Ya saya tidak tahu sulit atau tidak, itu tergantung pada mereka yang punya kompetensi terlibat dalam perubahan amandemen.

P: Apakah anda ditunjuk untuk melakukan liputan mengenai wacana perempuan raja kraton ini?

A: Saat itu saya ditugaskan oleh redaktur untuk menindaklanjuti berita yang bergulir mengenai wacana perempuan menjadi raja Kraton Yogya, **Mengapa?** Karena berita ini sangat menarik.

P: Apa yang membuat wacana ini menjadi menarik untuk diberitakan?

A: Menarik karena kriteria berita, kelayakan berita itu kan banyak ya, adapun yang menarik karena hal ini sangat fenomenal fenomenalnya adalah ya ini adalah hal yang luar biasa, beda dan aktual pasti. Ya karena untuk perempuan menjadi Raja Kraton saat ini kan sangat aneh. Jelas kita tahu bahwa paugeran yang ada di kraton Yogya itu yang merupakan keturunan dari kerajaan Islam itu tidak memungkinkan bahwa seorang perempuan menjadi pemimpin. *Nah* tapi Sultan mengugulirkan wacana itu. *Nah* oleh sebab itu masyarakat perlu tahu, masyarakat perlu referensi sebenarnya ada apa di balik wacana yang digulirkan Sultan itu,. Untuk itu kita perlu memperkaya itu dengan menggali lebih jauh melalui orang-orang yang memiliki kompetensi dibidangnya, seperti Sejarahwan UGM. Yang ternyata memang betul dia mampu mengungkap sejarah Mataram, yang pernah dipimpin oleh raja perempuan. Tapi waktu itu kan Mataram Hindu, bukan Mataram Islam. Jadi memberikan referensi, ingin memberi pengetahuan kepada masyarakat *aja*.

P: *Frame* yang ditampilkan dalam berita yang anda tulis merupakan penugasan dari redaksi atau anda yang membuat?

A: Mungkin karena masalah kepercayaan ya, jadi saya diberi kebebasan untuk membuat *frame* sendiri. *Frame* yang saya pakai waktu itu adalah ya referensi, karena yang saya wawancarai adalah pakar sejarah. Dimana sejarah zaman dulu terkait dengan wacana yang bergulir ini. Jadi Prof Djoko Suryo bisa menampilkan fakta sejarah bahwa seorang perempuan bisa menjadi raja

P: Bagaimana dengan penentuan narasumber? Siapa yang menentukan, redaksi atau anda sendiri?

A: Pemilihan narasumber saya yang memilih. Berdasarkan substansi diambil dari sejarahwan, yang kedua adalah siapa yang paling gampang untuk dihubungi. Waktu itu penentuan mengenai liputan ini malam-malam. Saya juga wawancara sudah malam sekitar jam 8 atau jam 9 malam saya telpon ke rumah beliau. Karena biasanya ada perkembangan-perkembangan yang mendesak, baru diketahui malam, dan malam itu harus *follow up*. *Nah* kadang-kadang banyak yang sudah tidur, ada yang sudah capek, lagi ada cara pengajian lagi ada acara apa kayak *gitu*, sehingga ya kadang tidak ada alasan yang spesifik terhadap narasumber, bahkan alasannya ya hanya dia yang bisa dihubungi malam itu.

Pemilihan narasumber orang yang berkompetensi, tidak sembarang orang bisa di wawancarai, pemilihan narasumber itu dipilih dan ditentukan berdasarkan kepentingan pemberitaan kalau memang untuk berita yang membutuhkan orang yang berkompetensi ya kita harus mewawancarai orang yang berkompetensi.

Pak Achiel ini termasuk orang yang berkompetensi karena diakan seorang advokat yang terkenal dan ternama, namun tidak menampik kemungkinan kita mewawancarai tukang becak pedagang di pasar, tapi *ya* itu pertanyaannya tidak sama yang ditanyakan pada narasumber yang berkompetensi itu.

P: Kenapa memilih narasumber Prof. Dr Djoko Suryo?

A: Yang pertama dia sejarahwa dan berkompetensi, dan kebetulan bisa dihubungi malam itu. Kalau ternyata nggak saya cari yang lain. Sering begitu itu,

P: Berdasarkan kebijakan redaksi berapa narasumber yang dibutuhkan dalam satu berita?

A: Jumlah narasumber itu dipengaruhi oleh jenis berita. Kalau beritanya tidak berbau konflik satu saja cukup. Tapi kalau konflik ya harus dua karena harus cover both sides. Asal bukan rumors asal bukan konflik satu saja cukup.

P: Bagaimana dengan pernyataan narasumber yang Anda pilih bagaimana?

A: Ya kedua narasumber kan menjelaskan bahwa di kraton sudah ada paugeran bahwa di situ sudah disebutkan bahwa tidak ada anak laki-laki maka bisa saudara laki-laki, dari raja sebelumnya, *ehhmm* saya sendiri tidak ingin mempengaruhi, tidak ada maksud untuk mempengaruhi masyarakat agar menolak wacana perempuan menjadi raja. Tapi secara kebetulan memang ada narasumber yang menyebutkan dan bernada tidak setuju karena sudah ada paugeran, dia bersikeras sudah laki-laki, nadanya kan begitu pesan yang ditangkap *kan* begitu, *nah* soal-soal seperti itu kita tidak menggiring masyarakat untuk mengikuti, karena secara toh ini berimbang karena Prof djoko sendiri berpendapat kalau ingin ada raja perempuan maka harus mengamandemen paugeran artinya ada alternatif, tapi narasumber satunya mengatakan kita sudah memiliki paugeran jadi kenapa repot-repot, bahasanya seperti itu. Kalau tidak ada anak laki-laki maka saudara laki-laki. Ini merupakan bentuk kami mengakomodir setiap aspirasi masyarakat, sebenarnya yang dilakukan KR ini adalah menampung aspirasi masyarakat, ada yang bilang kalau ingin perempuan yang paugeran diamandemen saja terlepas dari sulit atau mudahnya, di berita lain narasumber bisa berkomentar lain *entah* itu apalah, jadi kita mengakomodir pendapat masyarakat kalau kita membendung pendapat-pendapat yang berbeda itu sama saja diri kita menjadi tidak independen, tidak obyektif.

P: Bagaimana dengan judul dan sub judul berita, siapa yang membuat?

A: Kalau itu saya sendiri yang membuat,

P: Dengan maksud apa memilih judul tersebut?

A: Ya maksudnya hanya untuk memberikan referensi pada masyarakat saja. Jadi kalau menginginkan perempuan berarti perlu mengamandemen paugeran, jadi ingin memberikan penjelasan bahwa kraton sudah memiliki paugeran, jadi kalau menginginkan perempuan ya paugerannya dicabut dulu diganti.

P: Bagaimana penempatan narasumber dalam berita yang anda buat ?

Mengapa Prof Djoko Suryo ditempatkan pada awal berita ?

A: Karena bobot beritanya lebih tinggi. Bukan karena sejarawhwan tapi karena bobot nilai beritanya lebih tinggi. Membuat berita itukan piramida terbalik, jadi yang besar ditaruh di atas

P: Apakah ada aturan redaksi terkait tentang panjang pendeknya berita?

A: Nggak sie. Sejauh mana itu perlu *ya* ditulis. Panjang pendeknya itu *ya* tidak ada aturannya.

P: Terkait dengan isu keadilan gender, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut?

A: Saya setuju bahwa raja kraton perempuan itu keadilan dan kesejahteraan gender terwujud.

P: Apakah pernah ideologi patriarki yang ada mempengaruhi dalam penulisan berita yang anda buat?

A: Itu tidak pernah terpikir untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pemilihan narasumber yang kesemuanya laki-laki itu karena kompetensi, bukan karena jenis kelamin.

P: Bagaimana dengan sistem rapat redaksi sendiri?

A: Rapat redaksi malam pukul 8 malam, dihadiri oleh redaktur dan wartawan membahas mengenai berita hari ini apa, ada nggak yang perlu ditindaklanjuti untuk menjadi *running news*, kalau tidak ada, apa yang diliput besok.

P: Sebenarnya Apa yang ingin Anda tonjolkan dari berita yang anda tulis?

A: Kepentingan masyarakat, karena wacana raja perempuan itu akan berdampak pada masyarakat, meskipun secara formal eh defacto kraton itu sudah tidak punya kekuasaan wilayah dan rakyat, ibarat sebuah negara *ya* syarat-syaratnya harus punya pemerintahan, wilayah dan rakyat nah itu semua kan kraton hampir tidak pernah bisa dilihat, tetapi masyarakat Yogyakarta masih merasa memiliki kraton. Sehingga apapun perubahan yang terjadi di kraton itu akan berdampak pada masyarakat, karena masyarakat masih merasa memilikinya. *Nah* oleh sebab itu dalam membuat berita pertimbangan utama dan pasti selalu menjadi yang utama adalah kepentingan publik. Bukan kepentingan KR, bukan kepentingan kraton, bukan kepentingan saya sendiri.

P: Apakah KR mengakomodir kepentingan rakyat dengan membuat pemberitaan seperti itu?

A: Iya mengutamakan kepentingan publik. Karena publik ingin tahu maka publik harus tahu. Sebab itu kita kasih tahu

P: Ada kendala ketika melakukan peliputan mengenai wacana perempuan raja kraton ini?

A: Nggak ada kendala.

P: Ketika menulis berita ini apakah memperhatikan perkembangan isu seputar wacana perempuan raja Yogya

A: Ya betul, agar tidak *overlapping* atau mengulang, jadi dilihat dulu berita-berita sebelumnya. Sehingga tidak mengulangi berita lagi.

P: Meliput berita ini sendirian?

A: Kalau ada dua kode ini berarti narasumber yang satunya diwawancarai wartawan lain. Seperti Pak Achiel ini diwawancarai mas Jono.

P: Yang menulis berita siapa?

A: Saya hanya melaporkan pada redaktur, ini hasil wawancara saya dengan Pak Djoko, kemudian mas Jono juga melaporkan hasil wawancara dengan pak Achiel jadi nanti yang menggabungkan adalah redaktur. Redaktur halaman.

P: Bagaimana dengan sistem seleksi berita?

A: Berita yang ditampilkan tentunya berita-berita yang menarik dunk. Kriteria menariknya? Berita yang menarik itu satu kontroversial, sedang tren, sedang aktual atau menjadi pembicaraan umum, *proximity* (kedekatan dengan secara geografis dan emosional), *prominence*,

P: Bagaimana dengan sistem seleksi berita?

A: Ya karena kepentingan publiknya besar. Karena kita menilai bahwa berita mengenai RUUK dan juga wacana ini kepentingan publiknya sangat besar, karena berkaitan langsung dengan rakyat Yogya. Dan sangat menarik untuk diberitakan. Pertimbangan redaksi KR bahwa kita menilai perbincangan UUK itu kepentingan publiknya sangat besar, itu menyangkut dengan warga DIY. Dalam RUUK itu kan banyak hal yang dibahas termasuk tanah, kebudayaan, kepemimpinan daerah, sehingga itu harus kita ikuti terus, jadi publik perlu tahu tentang perkembangan perjalanan RUUK. Apalagi kraton masih memiliki pengaruh pada masyarakat, apalagi masih banyak asset-aset kraton yang dimanfaatkan oleh masyarakat contohnya *Sultan Ground*. Bahkan banyak yang sudah dialihkan menjadi hak milik desa. Banyak juga yang menjadi milik negara padahal milik kraton

P: Apakah kedekatan historis dengan Kraton mempengaruhi pemberitaan seputar kraton?

A: Sama sekali tidak ada. Intervensi kraton tidak ada, KR itu independen

P: Apakah mengutamakan netralitas dalam pemberitaan ?

A: Tidak, kami berpihak pada kepentingan publik,. Media tidak boleh netral lho, harus berpihak. Lha kalau netral nanti ada mafia yang berkuasa yang punya kebijakan yang merugikan masyarakat kalau kita (media) netral maka akan menjadi-jadi itu pemerintah.

Netral itu kan seperti tidak memiliki pendirian, independen itu kan tidak bergantung, tidak bergantung itu maksudnya mandiri, punya prinsip. Tidak bergantung itu maksudnya kita melakukan sesuatu dengan kemampuan sendiri,

tidak memerlukan pihak lain. Sedangkan media itu harus berpihak, kenapa harus berpihak karena harus punya sikap. Ketika pemerintah memiliki kebijakan yang merugikan masyarakat, jika media netral maka akan menjadi-jadi. Menginjak-injak hak rakyat. Tapi kalau kita berpihak pada kepentingan publik atau kepentingan rakyat pada saat itulah kita menyuarakan kepentingan rakyat maka si pemilik kebijakan tidak semena-mena. Maka seperti yang saya katakan tadi, kita harus berpihak tapi independen. Oleh sebab itu media tidak boleh netral. Tapi jangan diartikan berpihak itu dalam situasi konflik *lho*, kalau dalam situasi konflik tidak boleh berpihak tapi tetap independen tidak boleh bergantung.

P: Ada pelatihan jurnalistik sebelum menjadi wartawan KR?

A: Oo ada. Semacam training. Seperti ditugaskan untuk liputan lalu disuruh menulis berita. Training intensifnya selama 2 minggu. Setelah itu ya *learning by doing*.

P: Latar belakang sebelum bergabung di KR

A: saya lulusan teknik sipil dan sudah 6 tahun bekerja di KR. Pertama kerja di radio, saya jadi reporter dan penyiar. Saya kerja di radio berita selama 4 tahun, bosan saya melamar di KR, saya lulus kuliah tahun 2000 dan situasi belum membaik saya melamar di KR dan sekarang diterusin *aja*, soalnya cari kerja lain nggak laku. Kebetulan pengalaman kerjaku *nggak bisa dipake* wirausaha, nggak bisa *dipake* untuk kerja yang lebih baik makanya saya *terusin aja*. Karena saya sudah merasa kerja di perusahaan terbaik, *hehehe*



Korannya Rakyat

Kedaulatan Rakyat sebagai sebuah merk legendaris di Indonesia yang terbit sejak 27 September 1945, hanya beberapa hari setelah proklamasi Republik Indonesia dimana ketika itu dibutuhkan sumber informasi bagi rakyat untuk menyebarkan semua aspirasi dan semangat perjuangan, sekarang setelah 65 tahun berlalu Kedaulatan Rakyat tetap setia bersama rakyat berkarya dan menyebarkan informasi yang benar dan berimbang dengan cepat dimana hal tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Koran Kedaulatan Rakyat ingin tetap menyebarkan informasi tersebut dengan cepat dan tepat sasaran. Maka seluruh jurnalis KR siap untuk menangkap dan mencari informasi serta mengolahnya dengan objektif serta berimbang sampai kemudian menyebarkan lembaran lembaran berita dari koran kebanggaan rakyat ini keseluruh penjuru daerah dalam pekat dan dinginnya malam supaya bisa diterima oleh pembaca pada saat yang tepat untuk menemani rakyat berkarya.

Menyajikan informasi yang aktual bukanlah hal yang mudah disaat ini, karena itu Koran Kedaulatan Rakyat berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Untuk memenuhi selera para pembaca, Kedaulatan Rakyat berusaha menggunakan bahasa yang lugas dan gampang dicerna oleh pembacanya, karena Kedaulatan Rakyat menyadari bahwa pembacanya terdiri dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yang berbeda tingkat pendidikannya.

Lahir Bersama Bangsa

Didirikan oleh H. Samawi (1913 - 1984) dan M. Wonohito (1912 - 1984). Dan para penerusnya yaitu Dr. H. Soemadi M. Wonohito, SH dan Drs. H.M. Idham Samawi merawat dan melanjutkan perjuangan para pendiri Kedaulatan Rakyat. Hingga saat ini Kedaulatan Rakyat dipimpin oleh direksi-direksi:

Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Pemasaran
Direktur Produksi
Direktur LitBang

Drs. HM Romli
Imam Satriadi, SH
Fajar Kusumawardhani, SE
Sugeng Wibowo, SH
H.M. Wirmon Samawi, SE, MIB

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab
Drs. Octo Lampito, MPd.

Wakil Pemimpin Redaksi

Drs. H. Ahmad Luthfie, MA, Ronny Sugiantoro, SPd, SE, MM
Redaktur Pelaksana

Drs Hudono, SH, Joko Budiarto, Musshada

Manager Litbang Diklat Redaksi

Wismoko Poernomo

Manager Produksi Redaksi

Ngabdul Wakhid

Pemimpin Perusahaan

Fajar Kusumawardhani, SE

Manager Sirkulasi

Purwanto Hening, BSc

Deputi Iklan

Aghus Heraswoto

Seiring dengan dinamika dan keinginan untuk menjumpai masyarakat kini Kedaulatan Rakyat telah menerbitkan berbagai media baru baik cetak yaitu Minggu Pagi dan Koran Merapi serta KR Radio 107.2 FM dan tidak ketinggalan krjogja.com dalam naungan KR Group.

Apa Yang Kami Raih

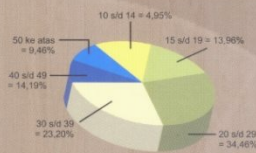
Cakram Award 2006 sebagai media cetak lokal terbaik 2006.

10 Besar Koran Terbaik 2005 dari Dewan Pers.

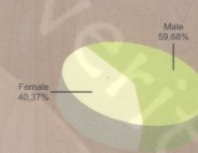
Peringkat 4 (empat) perolehan iklan nasional periode Januari - Desember 2005 menurut survey Nielsen Media Research.

Peringkat 7 (tujuh) jumlah pembaca pada kategori All People menurut survey Nielsen Media Research Wave III th 2006.

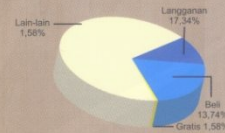
Siapa Pembaca Kami



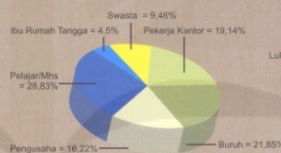
Profil Usia



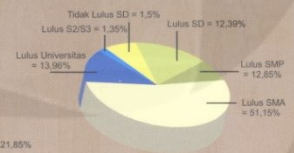
Profil Jenis Kelamin



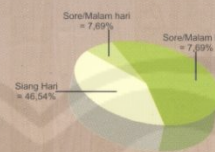
Cara Dapat KR



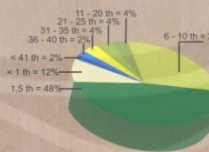
Profil Pekerjaan



Profil Pendidikan



Waktu Baca



Lama Baca



Tiras

Daerah Istimewa Yogyakarta		Daerah-Daerah Lainnya	
Kota Yogyakarta	49.229	Jawa Tengah	12.211
Sleman	35.534	Jawa Timur	724
Bantul	14.758	Jawa Barat	352
Kulon Progo	4.036	DKI Jakarta	1.937
Gunung Kidul	5.670	Kalimantan	88
		Sumatera	9
		Bali	24
JUMLAH	109.227	JUMLAH	15.312

TOTAL 124.539

Tarif Iklan

1. Iklan Umum/Display	: Rp. 19.000,-/mm kl
2. Iklan Keluarga	: Rp. 10.000,-/mm kl
3. Iklan Baris/Cilik (min. 30 baris, maks. 100 baris)	: Rp. 11.000,-/baris
4. Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm)	: Rp. 10.000,-/mm kl
5. Iklan Khusus: ukuran 1 kl x 45 mm Wisuda (lulus studi D1- S1), Pernikahan, Ulang Tahun	: Rp. 175.000,-
6. Iklan Warna Full Colour	: Rp. 35.000,-/mm kl
7. Iklan Kuping (ukuran 2 kl x 40 mm)	: 500% dari tarif
8. Iklan Halaman 1 (min. 2 kl x 30 mm, maks. 2 kl x 150 mm)	: 300% dari tarif
9. Iklan Halaman Terakhir	: 200% dari tarif

Catatan

- Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%.
- Permintaan halaman yang bersifat mengikat dikenakan tambahan 25% dari tarif.
- Iklan kreatif, center spread, dikenakan tambahan 25% dari tarif.
- Space iklan full colour minimal 600 mm kl.
- Tinggi iklan 500 mm kl dihitung dengan tariff maksimal 530 mm kl.
- Materi iklan berupa materi siap cetak (FA / Film), CD, Flashdisk, E-Mail.
- E-Mail iklankr04@yahoo.com dan iklankryk@gmail.com.

Tarif Pariwara

1. Ukuran	: - 1 halaman FC	: Rp. 65.000.000,00
	: - 1 halaman BW	: Rp. 32.500.000,00
2. Ukuran	: - ½ halaman FC	: Rp. 33.000.000,00
	: - ¼ halaman BW	: Rp. 16.500.000,00
3. Ukuran	: - ¼ halaman FC	: Rp. 15.000.000,00
	: - ¼ halaman BW	: Rp. 8.500.000,00

Catatan

- Ukuran minimal ¼ halaman.
- Tinggi pariwara 500mm dihitung dengan tarif maksimal 530 mm.
- Harga belum termasuk biaya desain dan film.
- Harga tersebut belum termasuk PPN 10%.
- Pembayaran tunai di muka sebelum pemuatan.
- Gambar/ produk maksimal sebesar 25% dari space yang ada.
- Materi jadi (siap cetak) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemuatan.
- Materi mentah (proses) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemuatan.

Data Media

Nama Media
Harian Umum Kedaulatan Rakyat.
Terbit 27 September 1945, 40 hari setelah Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia. Merupakan Koran pertama di
Era Republik Pelopor Pers Pancasila.

Haluan
Independent

Motto
Migunani Tumraping Liyan.
Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat bisa bermakna besar
bagi orang lain. Berguna bagi sesama membuat hidup lebih berarti

Perintis
H. Samawi (1913 - 1984) & M. Wonohito (1912 - 1984)

Penerbit
PT. BP. Kedaulatan Rakyat

SIUPP
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986. Tanggal 4 Desember 1990

Alamat Redaksi
Jl. P. Mangkubumi 40-42-44-46, Yogyakarta 55232
Telp. (0274) 565685 (hunting) Faks. (0274) 563125

Alamat Percetakan
Percetakan Kedaulatan Rakyat
Jl. Raya Yogya - Solo Km 11, Sleman, Yogyakarta - 55573
Telp. (0274) 496549, 496449

Bank
Bank BNI - Rek. Giro No. 003 044 0854
Bank Bukopin - Rek. No. 1000 103 043
Dinas Giro dan Cekpos No. j.15.78

Alamat Homepage
<http://www.kr.co.id>

Alamat Email
Redaksi : redaksi@kr.co.id Iklan : iklankryk@gmail.com

Alamat Perwakilan

Jakarta Jl. Utan Kayu No. 104 B Jakarta Timur - 13120 Telp. (021) 8563602 Faks. (021) 8500529	Kedu Selatan Jl. Veteran Blok A Kav. 6 Purworejo Plaza Purworejo, Telp. (0275) 321848
Purwokerto Jl. Prof. Moh. Yamin No. 5 Purwokerto, Telp. (0281) 622244	Klaten & Boyolali Jl. Pandanaran Ruko No. 2-3 Bendogantungan Klaten Telp. (0272) 322756
Gunung Kidul Jalan Sri Tanjung No. 4 Purwosari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Telp. 393562, 394707	Semarang Jl. Lamoersari No. 62 - Semarang Telp. (0274) 8315792, 8448622
Surakarta Jl. Bhayangkara No.13 (lama No. 42) Surakarta - 57141 Telp. (0271) 718015	Kulonprogo Jalan Veteran no 16 Wates, Telp. 774738
	Kedu Utara Jalan Achmad Yani no 133, Magelang Telp. (0293) 363552 dan 362503

Migunani Tumraping Liyan

Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat
bisa bermakna besar bagi orang lain.
Berguna bagi sesama membuat hidup lebih berarti

Jl. P. Mangkubumi 40-42-44-46, Yogyakarta 55232

Telp. (0274) 565685 (hunting) Faks. (0274) 563125

E-Mail Redaksi redaksi@kr.co.id

E-Mail Iklan iklankr@gmail.com

<http://www.kr.co.id>